

Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2022

Annisa' Nur Fitriani¹, Nur Hayati²

^{1,2}Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Trunojoyo Madura

fitrianiannisa1713@gmail.com ¹, nur.hayati@trunojoyo.ac.id ²

ABSTRACT

This study aims to analyze the performance of the Madiun Regency regional revenue and expenditure budget (APBD) for the 2018-2022 period using descriptive quantitative methods. Secondary data was taken from the annual report of Madiun Regency's budget realization on the official government website, www.madiunkab.go.id. The results of the analysis show a significant increase in the realization of regional own-source revenue (PAD) and overall regional revenue during the period. There are concerns regarding the low fiscal decentralization ratio and high dependence on transfer revenues from the central government. Despite effective PAD realization, Madiun District has not yet achieved the expected fiscal independence. Expenditure variance analysis revealed large variations between the district's expenditure budget and expenditure realization, highlighting the importance of careful budget planning and efficient financial management. This study concludes that Madiun district needs to increase efforts in developing local revenue sources, reduce dependence on transfer revenues, and improve the efficiency and effectiveness of budget management to achieve better fiscal independence and ensure regional financial sustainability.

Keywords: *Regional Revenue and Expenditure Budget, Fiscal Decentralization, Regional Original Revenue*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Madiun periode 2018-2022 dengan metode kuantitatif deskriptif. Data sekunder diambil dari laporan tahunan realisasi anggaran Kabupaten Madiun di website resmi pemerintah, www.madiunkab.go.id. Hasil analisis menunjukkan peningkatan signifikan dalam realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan pendapatan daerah secara keseluruhan selama periode tersebut. Terdapat kekhawatiran terkait rendahnya rasio desentralisasi fiskal dan tingginya ketergantungan pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Meski realisasi PAD efektif, Kabupaten Madiun belum mencapai kemandirian fiskal yang diharapkan. Analisis varian belanja mengungkap variasi besar antara anggaran belanja daerah dan realisasi belanja daerah, menyoroti pentingnya perencanaan anggaran yang cermat dan pengelolaan keuangan yang efisien. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kabupaten Madiun perlu meningkatkan upaya dalam pengembangan sumber pendapatan lokal, mengurangi ketergantungan pada pendapatan transfer, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran untuk mencapai kemandirian fiskal yang lebih baik dan memastikan keberlanjutan finansial daerah.

Kata kunci: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Desentralisasi Fiskal, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PENDAHULUAN

Pembentukan pemerintah daerah secara intrinsik terkait dengan alokasi dan pengelolaan anggaran dan pendapatan daerah. Setiap tahun, pemerintah daerah harus membuat rencana anggaran yang dikenal sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pengelolaan anggaran ini harus taat pada peraturan perundang-undangan, menjamin efektivitas, efisiensi, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, serta memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat (Nuzullestary & Mulyaningsih, 2021).

Penatausahaan yang efektif sangat penting bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengelolaan keuangan daerah yang efektif akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan suatu daerah. Untuk menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja APBD. Analisis rasio keuangan daerah merupakan alat ukur kinerja yang menjadi dasar dalam mengelola organisasi pemerintah dan menjamin pertanggungjawaban publik oleh instansi pemerintah kepada masyarakat luas. Pemerintah daerah menggunakan evaluasi kinerja anggaran untuk mengevaluasi akuntabilitas dan kemampuan keuangan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah (Miswati Gultom et al., 2020).

Kabupaten Madiun sebagai daerah otonom, diamanahi tanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan secara transparan dan akuntabel. Laporan-laporan tersebut menjadi tolok ukur keberhasilan keuangan pemerintah. Kabupaten Madiun telah dianugerahi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Timur selama sepuluh kali berturut-turut. Penghargaan ini secara khusus diberikan untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun tahun anggaran 2013-2022 (Madiunkab.go.id, 2023). Pencapaian ini menunjukkan dedikasi Kabupaten Madiun dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, serta menyoroti kepatuhan pemerintah daerah terhadap aturan akuntansi dan pengelolaan keuangan negara. Penghargaan ini sangat memotivasi mengingat kriteria ketat yang diberlakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam mengawasi dan memeriksa proses pengelolaan keuangan.

Akan tetapi, tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Madiun masih memerlukan perhatian khusus terutama dalam hal kemandirian daerah. Kemandirian daerah Kabupaten Madiun dinilai masih rendah. Rendahnya kemandirian daerah ini menandakan bahwa ketergantungan Kabupaten Madiun pada dana Pemerintah Pusat dan kurangnya kemampuan dalam memanfaatkan pendapatan asli daerah untuk pembangunan. Peningkatan dana dari Pemerintah Pusat juga memperkuat ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten pada subsidi

serta kurangnya inisiatif dan kemampuan dalam mengelola pendapatan daerah dan inefisiensi dalam belanja daerah.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian (Rahadi & Digdowiseiso, 2024) dan (Ibraim & Digdowiseiso, 2023). Penelitian ini menggabungkan metode analisis data yang digunakan dalam kedua penelitian tersebut. Penelitian yang dilakukan (Rahadi & Digdowiseiso, 2024) menggunakan metode analisis rasio keuangan menurut (Mahmudi, 2016) diantaranya rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD), Rasio Kemandirian fiskal, dan rasio ketergantungan fiskal. Penelitian yang dilakukan (Ibraim & Digdowiseiso, 2023) menggunakan metode analisis data untuk anggaran belanja daerah menurut (Halim, 2011) diantaranya analisis varians belanja, analisis pertumbuhan belanja, analisis efisiensi belanja, analisis pembiayaan, dan analisis keserasian belanja.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kuantitatif deskriptif, yang melibatkan klasifikasi, perbandingan, dan penghitungan data numerik dengan menggunakan rumus tertentu. Penelitian kuantitatif deskriptif melibatkan pengumpulan data dari sebagian populasi penelitian dan menganalisisnya menggunakan metode statistik (Digdowiseiso & Alfian, 2023). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data triwulanan mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Data tersebut bersumber dari situs resmi pemerintah yaitu www.madiunkab.go.id dan disajikan dalam laporan tahunan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun tahun 2018-2022 yang tersedia untuk publik.

Perhitungan data dilakukan dengan menggunakan analisis rasio keuangan daerah (Mahmudi, 2016), yaitu:

Rasio Desentralisasi Fiskal

Rasio desentralisasi fiskal adalah metrik yang mengukur persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari keseluruhan Pendapatan Daerah dalam satu tahun (Mahmudi, 2016). PAD mencakup berbagai sumber pendanaan, termasuk pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan yang dihasilkan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sumber-sumber PAD lainnya yang sah. Total pendapatan suatu daerah ditentukan oleh jumlah pendapatan PAD, pendapatan transfer yang diterima dari pemerintah pusat, dan sumber pendapatan tambahan lainnya. Ketika rasio desentralisasi fiskal meningkat, proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah juga meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kapasitas keuangan yang lebih besar. Rumus dan skala interval yang digunakan untuk menghitung rasio desentralisasi fiskal adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Desentralisasi Fiskal Tahun } n \\ &= \frac{\text{Realisasi PAD Tahun } n}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah Tahun } n} \times 100\% \end{aligned}$$

Tabel 1. Skala Interval Rasio Desentralisasi Fiskal

Sumber : (Fisipol UGM, 1991)

Rasio Desentralisasi Fiskal (%)	Kemampuan Fiskal
0-10	Sangat Kurang
10-20	Kurang
20-30	Cukup
30-40	Sedang
40-50	Baik
>50	Sangat Baik

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio efektivitas PAD mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target penerimaan PAD yang telah ditetapkan (Mahmudi, 2016). Rasio ini mengukur sejauh mana penerimaan PAD aktual sesuai dengan anggaran PAD. Rasio efektivitas PAD yang semakin tinggi mengindikasikan tingkat kemahiran pemerintah daerah dalam mengelola uang PAD. Rumus dan skala interval dari rasio efektivitas PAD adalah sebagai berikut:

$$Rasio\ Efektivitas\ PAD\ Tahun\ n = \frac{Realisasi\ PAD\ Tahun\ n}{Anggaran\ PAD\ Tahun\ n} \times 100\%$$

Tabel 2. Skala Interval Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber: (Fisipol UGM, 1991)

Rasio Efektifitas PAD (%)	Kategori
<75	Tidak Efektif
75-89	Kurang Efektif
90-99	Cukup Efektif
100	Efektif
>100	Sangat Efektif

Rasio Kemandirian Fiskal

Rasio Kemandirian fiskal didefinisikan sebagai sejauh mana suatu daerah dapat mendanai pertumbuhannya sendiri, layanan publik, dan pembayaran pajak dan bea sepenuhnya dari sumber pendapatannya sendiri (Yulinchton et al., 2022). Rasio ini mengevaluasi realisasi pendapatan PAD dibandingkan dengan realisasi pendapatan transfer. Semakin besar rasio kemandirian fiskal suatu daerah, maka daerah tersebut semakin mandiri. Rasio kemandirian fiskal dapat dihitung dengan menggunakan rumus dan skala interval sebagai berikut:

$$Rasio\ Kemandirian\ Fiskal\ Tahun\ n = \frac{Realisasi\ PAD\ Tahun\ n}{Realisasi\ Pendapatan\ Transfer\ Tahun\ n} \times 100\%$$

Tabel 3. Skala Interval Rasio Kemandirian Fiskal

Sumber : (Fisipol UGM, 1991)

Kemampuan Daerah	Rasio Kemandirian Fiskal (%)	Kategori
Belum Mandiri	0-25	Instruktif
Menuju Mandiri	25-50	Konsultatif
Mandiri	50-75	Partisipatif
Sangat Mandiri	75-100	Delegatif

Rasio Ketergantungan Fiskal

Menurut Mahmudi (2016), Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah dihitung dengan cara membandingkan pendapatan daerah secara keseluruhan pada tahun tertentu dengan pendapatan transfer yang diperoleh daerah tersebut. Realisasi pendapatan asli daerah dibandingkan dengan realisasi pendapatan transfer dalam rasio ini. Rasio Ketergantungan Fiskal yang meningkat menunjukkan bahwa pemerintah negara bagian dan daerah semakin bergantung pada pembiayaan federal. Formula dan skala interval dari rasio ketergantungan fiskal sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & \text{Rasio Ketergantungan Fiskal} \\
 & = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Transfer Tahun } n}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah Tahun } n} \times 100\%
 \end{aligned}$$

Tabel 4. Skala Interval Rasio Ketergantungan Fiskal

Sumber: (Fisipol UGM, 1991)

Rasio Ketergantungan Fiskal (%)	Kategori
0-25	Sangat Rendah
25-50	Rendah
50-75	Sedang
75-100	Tinggi

Selanjutnya, perhitungan data yang digunakan untuk mengetahui kinerja belanja pemerintah daerah adalah (Halim, 2011):

Analisis Varians Belanja

Varians pengeluaran mengacu pada perbandingan antara jumlah uang aktual yang dibelanjakan dengan anggaran pengeluaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Rumus untuk menghitung varians pengeluaran adalah:

$$\text{Varians Belanja} = \text{Anggaran Belanja} - \text{Realisasi Belanja}$$

Analisis Pertumbuhan Belanja

Pertumbuhan belanja mengacu pada peningkatan tahunan dalam jumlah uang yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan belanja. Rumus untuk menganalisis pertumbuhan belanja adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Pertumbuhan Belanja Tahun } t \\ &= \frac{\text{Belanja Tahun } t - \text{Belanja Tahun } (t - 1)}{\text{Belanja Tahun } (t - 1)} \times 100\% \end{aligned}$$

Analisis Efisiensi Belanja

Analisis efisiensi diukur dengan rasio pengeluaran aktual terhadap pengeluaran yang direncanakan, yang dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Analisis Pembiayaan

Studi pendanaan melibatkan perbandingan SILPA dari tahun ke tahun. SILPA yang lebih tinggi mengindikasikan laporan anggaran yang kurang akurat.

Analisis Keserasian Belanja.

Untuk menganalisis keserasian belanja digunakan rasio - rasio :

- i. Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja.

$$\frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$
- ii. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja

$$\frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bertanggung jawab untuk mengelola potensi daerah sebagai penghasil pendapatan, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah sistem terpadu yang memperhitungkan hal ini. Pendapatan daerah merupakan perkiraan dari setiap sumber pendapatan yang telah ditetapkan secara wajar. Mempertahankan dan meningkatkan pendapatan daerah merupakan tujuan tahunan di Kabupaten Madiun.

Tabel 5. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2022 (dalam Rupiah)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Madiun Tahun 2018-2022

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	Total Pendapatan
2018	219.041.431.266,71	1.555.025.294.776	55.515.400.000	1.829.582.126.042,71
2019	229.206.394.170,37	1.659.023.813.099	58.786.567.827	1.947.016.775.096,37
2020	258.211.505.535,08	1.518.370.856.713	65.875.038.590	1.842.457.400.838,08
2021	333.154.568.459,37	1.607.585.219.548	37.753.496.505	1.978.493.284.512,37
2022	377.425.844.392,10	1.615.008.705.848	14.623.102.545	2.007.057.652.785,10

Data yang disajikan menggambarkan penerimaan pemerintah Kabupaten Madiun dari berbagai bentuk pendapatan daerah, yang meliputi “Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah, selama periode 2018 hingga 2022”. Meskipun terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ke tahun, namun hal tersebut tidak memberikan dampak yang cukup besar terhadap belanja Kabupaten Madiun secara keseluruhan.

Pemerintah Kabupaten Madiun menetapkan target kinerja untuk seluruh belanja, termasuk yang terkait dengan satuan kerja perangkat daerah, program, dan kegiatan. Tujuan dari tahap ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional keuangan, serta meningkatkan akuntabilitas. Berdasarkan indikator, tolok ukur, dan target kinerja yang ada, program dan kegiatan perlu memberikan data yang jelas, terukur, dan relevan dengan hasil yang diharapkan.

Tabel 6. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2022 (dalam Rupiah)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Madiun Tahun 2018-2022

Tahun	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Total Belanja
2018	1.152.423.872.722,83	291.642.038.611,80	802.998.320	314.955.400.740,00	1.759.824.310.394,63
2019	1.168.314.205.370,90	357.952.659.653,67	1.442.922.500	420.601.703.603,00	1.948.311.491.127,60
2020	1.136.729.845.289,80	254.429.829.266,14	17.643.313.484	387.754.962.296,97	1.796.557.950.336,91
2021	1.241.716.368.749,17	183.413.874.591,70	27.217.883.918	413.991.532.009,00	1.866.339.659.267,87
2022	1.303.324.777.859,60	318.862.276.800,00	7.033.196.692	430.304.486.067,00	2.059.524.737.418,60

Tabel 6 memberikan gambaran visual tentang alokasi belanja daerah pemerintah Kabupaten Madiun untuk tahun 2018 hingga 2022. Belanja daerah terdiri dari empat komponen utama: belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Terlihat jelas bahwa anggaran Kabupaten Madiun lebih banyak dialokasikan untuk belanja operasi daripada belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer.

Rasio Desentralisasi Fiskal

Tabel 7. Hasil Perhitungan Rasio Desentralisasi Fiskal (Dalam Rupiah)

Sumber: Kabupaten Madiun Dalam Angka Tahun 2018-2022 yang Diolah

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Pendapatan Daerah	Rasio	Keterangan
2018	219.041.431.266,71	1.829.582.126.042,71	12%	Kurang Efektif
2019	229.206.394.170,37	1.947.016.775.096,37	12%	Kurang Efektif
2020	258.211.505.535,08	1.842.457.400.838,08	14%	Kurang Efektif
2021	333.154.568.459,37	1.978.493.284.512,37	17%	Kurang Efektif
2022	377.425.844.392,10	2.007.057.652.785,10	19%	Kurang Efektif

Berdasarkan tabel tersebut, Kabupaten Madiun mengalami peningkatan yang substansial dalam realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan pendapatan daerah secara keseluruhan dari tahun 2018 hingga 2022. Terdapat tren yang mengkhawatirkan dalam rasio antara PAD dan pendapatan daerah secara keseluruhan. Rasio ini menunjukkan persentase uang yang diperoleh dari sumber-sumber lokal, seperti pajak dan retribusi, dari keseluruhan pendapatan daerah. Pada tahun 2018, proporsi pendapatan yang dihasilkan secara internal berada pada angka 12%, dan mengalami sedikit peningkatan menjadi 14% pada tahun 2020. Kenaikan tersebut tidak sebanding dengan kenaikan total pendapatan daerah, sehingga rasio tersebut terus berada pada level yang rendah. Pada tahun 2022, rasio tersebut telah mencapai 19%, yang menunjukkan peningkatan ketergantungan pada sumber pendapatan yang bukan berasal dari daerah setempat.

Kabupaten Madiun menunjukkan kecenderungan yang meningkat dalam ketergantungan pada dana transfer dan sumber-sumber pendapatan non-lokal lainnya. Kondisi ini memberikan indikasi bahwa terdapat tantangan dalam pengembangan ekonomi lokal dan keberlanjutan finansial Kabupaten Madiun yang perlu diatasi melalui upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah serta mengurangi ketergantungan pada pendapatan non-lokal. Ketergantungan yang tinggi pada sumber-sumber pendapatan non-lokal dapat menimbulkan risiko keberlanjutan finansial dalam jangka panjang. Kondisi ini memunculkan beberapa kekhawatiran, termasuk ketergantungan pada dana transfer, kemandirian keuangan yang rendah, dan keterbatasan pengembangan ekonomi lokal.

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tabel 8. Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Dalam Rupiah)

Sumber: Kabupaten Madiun Dalam Angka Tahun 2018-2022 yang Diolah

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Anggaran Pendapatan Asli Daerah	Rasio	Keterangan
2018	219.041.431.266,71	211.675.179.290,80	103%	Sangat Efektif
2019	229.206.394.170,37	209.130.880.908,84	110%	Sangat Efektif
2020	258.211.505.535,08	215.747.202.320,52	120%	Sangat Efektif
2021	333.154.568.459,37	318.464.845.137,00	105%	Sangat Efektif
2022	377.425.844.392,10	330.218.279.110,00	114%	Sangat Efektif

Pada tahun 2018, realisasi PAD Kabupaten Madiun mencapai 103% dari anggaran yang telah ditetapkan. Artinya, pendapatan yang sebenarnya dihasilkan melebihi target yang telah direncanakan sebelumnya. Hal serupa terjadi pada tahun-tahun berikutnya, dengan rasio efektivitas PAD mencapai puncaknya pada tahun 2020 dengan 120%. Secara keseluruhan, rasio efektivitas PAD tetap relatif tinggi di atas 100% pada setiap tahunnya, yang menunjukkan bahwa realisasi pendapatan asli daerah melebihi atau setidaknya mencapai target yang telah ditetapkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Madiun berhasil mengelola PAD dengan baik, bahkan mampu menghasilkan pendapatan yang lebih besar dari yang telah direncanakan.

Rasio Kemandirian Fiskal

Tabel 9. Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Fiskal (Dalam Rupiah)

Sumber: Kabupaten Madiun Dalam Angka Tahun 2018-2022 yang Diolah

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Pendapatan Transfer	Rasio	Keterangan
2018	219.041.431.266,71	1.555.025.294.776,00	14,09%	Belum Mandiri/Instruktif
2019	229.206.394.170,37	1.659.023.813.099,00	13,82%	Belum Mandiri/Instruktif
2020	258.211.505.535,08	1.518.370.856.713,00	17,01%	Belum Mandiri/Instruktif

2021	333.154.568.459,37	1.607.585.219.548,00	20,72%	Belum Mandiri/Instruktif
2022	377.425.844.392,10	1.615.008.705.848,00	23,37%	Belum Mandiri/Instruktif

Dalam rentang waktu 2018-2022, Kabupaten Madiun belum mencapai tingkat mandiri yang diharapkan dalam pengelolaan keuangan daerah, yang tercermin dalam rasio kemandirian fiskal yang rendah. Pada tahun 2018, rasio kemandirian fiskal Kabupaten Madiun sebesar 14,09%, yang menunjukkan bahwa hanya sekitar 14% dari total pendapatan Kabupaten Madiun berasal dari sumber-sumber lokal, sedangkan sisanya berasal dari pendapatan transfer. Selama periode lima tahun, rasio kemandirian fiskal Kabupaten Madiun mengalami peningkatan bertahap dan mencapai 23,37% pada tahun 2022. Rasio tersebut masih di bawah level yang diharapkan untuk mencapai tingkat kemandirian yang memadai.

Rasio Ketergantungan Fiskal

Tabel 10. Hasil Perhitungan Rasio Ketergantungan Fiskal (Dalam Rupiah)

Sumber: Kabupaten Madiun Dalam Angka Tahun 2018-2022 yang Diolah

Tahun	Realisasi Pendapatan Transfer	Realisasi Pendapatan Daerah	Rasio	Keterangan
2018	1.555.025.294.776,00	1.829.582.126.042,71	84,99%	Tinggi
2019	1.659.023.813.099,00	1.947.016.775.096,37	85,21%	Tinggi
2020	1.518.370.856.713,00	1.842.457.400.838,08	82,41%	Tinggi
2021	1.607.585.219.548,00	1.978.493.284.512,37	81,25%	Tinggi
2022	1.615.008.705.848,00	2.007.057.652.785,10	80,47%	Tinggi

Berdasarkan tabel 10 di atas, Kabupaten Madiun menunjukkan tingkat ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat atau sumber-sumber pendapatan non-lokal lainnya selama tahun 2018-2022. Hal ini tercermin dari rasio ketergantungan fiskal yang stabil di atas 80% selama lima tahun berturut-turut. Pada tahun 2018, rasio ketergantungan fiskal mencapai 84,99%, yang berarti sekitar 85% dari total pendapatan daerah berasal dari pendapatan transfer. Selama periode lima tahun, rasio ini mengalami fluktuasi kecil, tetapi tetap berada pada tingkat yang tinggi. Tingkat ketergantungan fiskal yang tinggi menandakan bahwa Kabupaten Madiun cenderung mengandalkan sumber-sumber pendapatan non-lokal untuk mendukung keuangan daerahnya.

Analisis Varians Belanja

Tabel 11. Varians Belanja Kabupaten Madiun Tahun 2018-2022 (Dalam Rupiah)

Sumber: Kabupaten Madiun Dalam Angka Tahun 2018-2022 yang Diolah

Tahun	Anggaran Belanja Daerah	Realisasi Belanja Daerah	Varians Belanja
2018	1.603.346.740.371,98	1.444.868.909.654,63	158.477.830.717,35
2019	1.683.057.951.669,10	1.527.709.787.524,57	155.348.164.144,53
2020	1.529.784.265.060,58	1.408.802.988.039,94	120.981.277.020,64
2021	2.070.774.769.258,23	1.866.339.659.267,87	204.435.109.990,36
2022	2.196.806.712.721,00	2.059.524.737.418,60	137.281.975.302,40

Berdasarkan tabel 11 di atas menunjukkan pada tahun 2018, anggaran belanja daerah Kabupaten Madiun ditetapkan sebesar Rp1.603.346.740.371,98, namun realisasi belanja daerah hanya mencapai Rp1.444.868.909.654,63, menghasilkan varians belanja sebesar Rp158.477.830.717,35. Begitu juga pada tahun-tahun berikutnya, dengan variasi belanja yang cukup besar, Rp155.348.164.144,53 pada tahun 2019, Rp120.981.277.020,64 pada tahun 2020, Rp204.435.109.990,36 pada tahun 2021, dan Rp137.281.975.302,40 pada tahun 2022.

Variasi besar antara anggaran belanja daerah dan realisasi belanja daerah mungkin disebabkan oleh beberapa faktor berikut:

1. Alokasi dana yang disediakan lebih besar dari yang sebenarnya diperlukan. Hal ini dapat dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan fluktuasi harga atau biaya tambahan yang mungkin terjadi selama tahun anggaran.
2. Adanya ketidakpastian pengeluaran. Dalam praktiknya, realisasi belanja daerah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang sulit diprediksi, termasuk perubahan kebijakan, kondisi pasar, atau kebutuhan mendesak yang muncul selama periode anggaran. Variasi antara anggaran dan realisasi belanja mencerminkan ketidakpastian dalam mengelola keuangan daerah.
3. Efisiensi pengelolaan anggaran. Variasi belanja yang terjadi juga dapat mencerminkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran, di mana daerah berhasil mengelola sumber daya dengan lebih baik daripada yang telah direncanakan. Namun, hal ini juga dapat menimbulkan pertanyaan tentang alokasi dana yang optimal dan perencanaan anggaran yang akurat.

Analisis Pertumbuhan Belanja

Tabel 12. Pertumbuhan Belanja Kabupaten Madiun Tahun 2018-2022 (Dalam Rupiah)

Sumber: Kabupaten Madiun Dalam Angka Tahun 2018-2022 yang Diolah

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi Belanja Daerah sebelumnya	Pertumbuhan
2018	1.444.868.909.654,63	1.790.817.628.207,72	-19,32%
2019	1.527.709.787.524,57	1.444.868.909.654,63	5,73%
2020	1.408.802.988.039,94	1.527.709.787.524,57	-7,78%
2021	1.866.339.659.267,87	1.408.802.988.039,94	32,48%
2022	2.059.524.737.418,60	1.866.339.659.267,87	10,35%

Tabel 12 menunjukkan pada tahun 2018 realisasi belanja daerah Kabupaten Madiun mencapai Rp1.444.868.909.654,63 yang menunjukkan penurunan signifikan sebesar -19,32% dari realisasi belanja sebelumnya, yang berada di angka Rp1.790.817.628.207,72. Penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh adanya perubahan dalam alokasi dana, penghematan anggaran, atau penundaan proyek-proyek yang direncanakan.

Pada tahun-tahun berikutnya, terjadi variasi dalam pertumbuhan belanja:

- Pada tahun 2019, terjadi pertumbuhan sebesar 5,73% dari realisasi belanja sebelumnya, mencapai Rp1.527.709.787.524,57. Ini menandakan adanya peningkatan pengeluaran dalam anggaran daerah Kabupaten Madiun dibandingkan tahun sebelumnya.
- Namun, pada tahun 2020, terjadi penurunan lagi sebesar -7,78% dari realisasi belanja sebelumnya, menjadi Rp1.408.802.988.039,94. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh faktor-faktor seperti pemangkasan anggaran dan faktor lainnya.
- Pada tahun 2021, terjadi pertumbuhan yang signifikan sebesar 32,48% dari realisasi belanja sebelumnya, mencapai Rp1.866.339.659.267,87. Pertumbuhan ini mungkin merupakan hasil dari alokasi dana yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan mendesak atau untuk mendukung pembangunan tertentu di Kabupaten Madiun.
- Pada tahun 2022, terjadi pertumbuhan sebesar 10,35% dari realisasi belanja sebelumnya, mencapai Rp2.059.524.737.418,60. Pertumbuhan ini menunjukkan adanya peningkatan belanja daerah Kabupaten Madiun yang terus menerus untuk mendukung pembangunan dan kegiatan pelayanan masyarakat.

Analisis Efisiensi Belanja

Tabel 13. Perhitungan Efisiensi Belanja Kabupaten Madiun Tahun 2018-2022 (Dalam Rupiah)

Sumber: Kabupaten Madiun Dalam Angka Tahun 2018-2022 yang Diolah

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Anggaran Belanja Daerah	Rasio
2018	1.444.868.909.654,63	1.603.346.740.371,98	90,12%
2019	1.527.709.787.524,57	1.683.057.951.669,10	90,77%
2020	1.408.802.988.039,94	1.529.784.265.060,58	92,09%
2021	1.866.339.659.267,87	2.070.774.769.258,23	90,13%
2022	2.059.524.737.418,60	2.196.806.712.721,00	93,75%

Tabel 13 mengenai efisiensi belanja Kabupaten Madiun dari tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan tingkat efisiensi yang relatif stabil dalam penggunaan anggaran belanja daerah selama periode lima tahun tersebut. Selama periode lima tahun tersebut, rasio efisiensi belanja daerah berada dalam kisaran 90%-93%. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Madiun berhasil menggunakan sebagian besar dari anggaran belanja yang telah dialokasikan.

Rasio efisiensi belanja menunjukkan sedikit fluktuasi dari tahun ke tahun, tetapi secara keseluruhan rasio ini mempertahankan kisaran yang cukup konsisten. Hal ini menunjukkan pengelolaan anggaran belanja daerah yang efektif oleh Kabupaten Madiun, karena mereka mengalokasikan dana sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan.

Analisis Pembiayaan

Tabel 14. Perbandingan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kabupaten Madiun Tahun 2018-2022 (Dalam Rupiah)

Sumber: Kabupaten Madiun Dalam Angka Tahun 2018-2022 yang Diolah

Tahun	SILPA	Keterangan
2018	172.022.584.669,26	Naik
2019	165.739.380.660,06	Turun
2020	207.138.831.161,23	Naik
2021	298.268.150.405,73	Naik
2022	219.337.965.772,23	Turun

Tabel 14 menggambarkan adanya variasi dalam sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) selama periode lima tahun tersebut. Dilihat dari kecenderungan umum, SILPA Kabupaten Madiun cenderung naik dari tahun 2018 hingga 2021 dan mengalami penurunan pada tahun 2022. Adanya variasi dalam SILPA mungkin tergantung pada faktor-faktor seperti perubahan dalam pengeluaran dan pendapatan, kebijakan anggaran, proyeksi ekonomi, atau peristiwa spesifik yang mempengaruhi keuangan daerah Kabupaten Madiun pada tahun-tahun tersebut.

Analisis Keserasian Belanja

i. Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja

Tabel 15. Hasil Perhitungan Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja Kabupaten Madiun Tahun 2018-2022 (Dalam Rupiah)

Sumber: Kabupaten Madiun Dalam Angka Tahun 2018-2022 yang Diolah

Tahun	Realisasi Belanja Operasi	Realisasi Belanja Daerah	Rasio
2018	1.152.423.872.722,83	1.444.868.909.654,63	79,76%
2019	702.639.387.723,00	1.527.709.787.524,57	45,99%
2020	1.136.729.845.289,80	1.408.802.988.039,94	80,69%
2021	1.241.716.368.749,17	1.866.339.659.267,87	66,53%
2022	1.303.324.777.859,60	2.059.524.737.418,60	63,28%

Analisis rasio belanja operasi terhadap total belanja Kabupaten Madiun dari tahun 2018 hingga 2022 mengungkapkan pola pengeluaran yang menunjukkan variasi selama periode lima tahun tersebut.

Pada tahun 2018, rasio belanja operasi terhadap total belanja mencapai 79,76%, yang menandakan bahwa sekitar 79,76% dari total belanja daerah digunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan. Rasio ini turun secara signifikan menjadi 45,99% di tahun 2019 yang menunjukkan penurunan yang drastis dalam alokasi dana untuk kegiatan operasional. Pada tahun 2020, rasio belanja operasi kembali meningkat menjadi 80,69%, menunjukkan adanya pemulihan dalam pengalokasian dana untuk kegiatan operasional pemerintahan. Rasio ini kembali menurun menjadi 66,53% dan 63,28% secara berturut-turut di tahun 2021 dan 2022.

Variasi dalam rasio belanja operasi terhadap total belanja ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. **Prioritas Pengeluaran.** Perubahan dalam prioritas pengeluaran daerah dapat mempengaruhi alokasi dana antara kegiatan operasional dan kegiatan lainnya. Penurunan rasio pada tahun 2019 mungkin merupakan hasil dari peningkatan alokasi dana untuk pembangunan atau program-program strategis lainnya.
2. **Kebijakan Anggaran.** Kebijakan penganggaran yang berbeda dari tahun ke tahun dapat mempengaruhi alokasi dana untuk kegiatan operasional. Penurunan rasio pada tahun 2021 dan 2022 mungkin disebabkan oleh peningkatan alokasi dana untuk pembangunan besar yang membutuhkan pengeluaran anggaran tambahan.
3. **Perubahan Kebutuhan.** Perubahan dalam kebutuhan pelayanan publik atau tuntutan administratif dapat mempengaruhi alokasi dana untuk kegiatan operasional. Penurunan rasio mungkin juga mencerminkan peningkatan biaya operasional yang tidak sebanding dengan total belanja daerah.

ii. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja

Tabel 16. Hasil Perhitungan Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Kabupaten Madiun Tahun 2018-2022

Sumber: Kabupaten Madiun Dalam Angka Tahun 2018-2022 yang Diolah

Tahun	Realisasi Belanja Modal	Realisasi Belanja Daerah	Rasio
2018	Rp291.642.038.611,80	Rp1.444.868.909.654,63	20,18%
2019	Rp357.952.659.653,67	Rp1.527.709.787.524,57	23,43%
2020	Rp254.429.829.266,14	Rp1.408.802.988.039,94	18,06%
2021	Rp183.413.874.591,70	Rp1.866.339.659.267,87	9,83%
2022	Rp318.862.276.800,00	Rp2.059.524.737.418,60	15,48%

Berdasarkan tabel 16 di atas, pada tahun 2018, rasio belanja modal terhadap total belanja mencapai 20,18% yang menandakan bahwa sekitar 20,18% dari total belanja daerah dialokasikan untuk pengeluaran modal, termasuk pembangunan infrastruktur dan investasi jangka panjang lainnya. Pada tahun-tahun berikutnya, rasio belanja modal mengalami variasi:

- Pada tahun 2019, rasio ini naik menjadi 23,43%, menunjukkan peningkatan dalam alokasi dana untuk belanja modal Kabupaten Madiun.
- Rasio belanja modal kembali turun menjadi 18,06% di tahun 2020. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh adanya penyesuaian anggaran atau prioritas pengeluaran Kabupaten Madiun pada tahun tersebut.
- Pada tahun 2021, rasio belanja modal turun lebih jauh menjadi 9,83%, menandakan penurunan yang signifikan dalam alokasi dana untuk belanja modal dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- Pada tahun 2022, rasio belanja modal kembali meningkat menjadi 15,48%, menunjukkan adanya peningkatan dalam alokasi dana untuk investasi jangka panjang.

Variasi dalam rasio belanja modal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti bagaimana prioritas pembangunan daerah Kabupaten Madiun dapat mempengaruhi alokasi dana untuk belanja modal, Ketersediaan sumber daya seperti anggaran, tenaga kerja, dan infrastruktur dapat mempengaruhi kemampuan Kabupaten Madiun untuk melaksanakan proyek-proyek pembangunan, dan Kebijakan penganggaran yang berbeda dari tahun ke tahun dapat mempengaruhi alokasi dana untuk belanja modal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berikut beberapa kesimpulan yang dapat diambil terkait kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Madiun tahun 2018-2022 :

1. Terjadi peningkatan yang signifikan dalam realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan pendapatan daerah secara keseluruhan. Namun masih terdapat pola yang mengkhawatirkan terkait ketergantungan yang tinggi pada dana transfer dan sumber-sumber pendapatan non-lokal lainnya. Hal ini menandakan tantangan

dalam pengembangan ekonomi lokal dan keberlanjutan finansial yang perlu diatasi melalui upaya meningkatkan pendapatan asli daerah serta mengurangi ketergantungan pada pendapatan non-lokal.

2. Efektivitas pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Madiun tergolong tinggi yang ditunjukkan oleh rasio efektivitas PAD yang secara konsisten melebihi atau setidaknya mencapai target yang telah ditetapkan. Sementara itu, dalam hal kemandirian fiskal daerah masih rendah, dengan hanya sekitar 23% pendapatan berasal dari sumber-sumber lokal pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan perlunya upaya untuk meningkatkan pengelolaan dan optimalisasi pendapatan asli daerah.
3. Terdapat variasi yang signifikan antara anggaran belanja daerah dan realisasi belanja daerah selama periode tersebut. Variasi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor termasuk alokasi dana yang lebih besar dari yang sebenarnya diperlukan, ketidakpastian pengeluaran, serta efisiensi pengelolaan anggaran. Meskipun variasi ini dapat mencerminkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran, juga memunculkan pertanyaan tentang alokasi dana yang optimal dan perencanaan anggaran yang akurat.

Dari persoalan tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa rekomendasi. Pertama, Kabupaten Madiun perlu melakukan upaya untuk meningkatkan pengelolaan dan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), termasuk peningkatan efisiensi pemungutan pajak dan retribusi daerah serta pengembangan potensi-potensi pendapatan lainnya. Kedua, Kabupaten Madiun dapat mempertimbangkan untuk menambah beragam sumber pendapatan daerah lainnya dengan mengembangkan potensi ekonomi lokal, seperti industri, pariwisata, dan pertanian, untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer dan pendapatan non-lokal. Ketiga, Kabupaten Madiun dapat melakukan upaya perbaikan untuk perencanaan anggaran dan evaluasi terhadap proses perencanaan anggaran untuk memastikan bahwa alokasi dana yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan nyata, menghindari pemborosan, dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Fisipol UGM. (1991). Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung jawab. Laporan Akhir Penelian, Litbang Depdagri.
- Halim, A. (2011). Analisis investasi (R. Untung (ed.); Kedua). Salemba Empat.
- Haridison, A., & Permana, D. (2021). Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan. *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 9(2), 53–74. <https://doi.org/10.34010/agregasi.v9i2.5396>
- Ibraim, S., & Digdowiseiso, K. (2023). Analisis Kinerja Anggaran Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah (Studi Kasus: Kabupaten Malang). *Jurnal Ilmiah*

- Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi, 10(2), 743–759.
- Mahmudi. (2016). Analisis laporan keuangan pemerintah daerah (Edisi keti). Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahsun, M. (2013). Pengukuran Kinerja Sektor Publik (Edisi Pert). BPFE.
- Mardiasmo. (2002). Otonomi dan manajemen keuangan daerah.
- Mataris, H., & Digdowiseiso, K. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017-2019. In *Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora* (Vol. 7, Issue 1). <https://doi.org/10.47313/pjsh.v7i1.1049>
- Miswati Gultom, Anggiat Sinurat, & Darwin Damanik. (2020). Analisis Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Pematangsiantar. *Jurnal Ekuilnomi*, 2(1), 12–17. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v2i1.347>
- Nasir, A. R. (2023). MONOGRAF KINERJA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI INDONESIA: MEMBANGUN KEMANDIRIAN DAERAH MELALUI PENDAPATAN ASLI DAERAH. CV. DOTPLUS Publisher.
- Nuzullestary, V., & Mulyaningsih, E. (2021). Kinerja Pengelolaan Keuangan Dan Tingkat Kemandirian Pemerintah Kota Cilegon Berdasarkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015-2019. *Tirtayasa EKONOMIKA*, 16(1), 44–58.
- Rahadi, A. D., & Digdowiseiso, K. (2024). For The Fiscal Year 2018 - 2022 Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018 – . *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(5), 5946–5956.
- Sari, P., & Baku, A. (2022). Jurnal Mirai Management Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato. *Jurnal Mirai Management*, 7(2), 395–406. <https://doi.org/10.37531/mirai.v7i2.2014>
- Sawitri, S. H., & Usman, S. (2023). ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2017-2021 Oleh. *Media Bina Ilmiah*, 17(1978), 2443–2454.
- Sumastuti, E., Nariyanti, E., & Indriasari, I. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2013-2017. *Indicators: Journal of Economic and Business*, 2(2), 302–309. <https://doi.org/10.47729/indicators.v2i2.67>
- Wardani, S., & Saleh, M. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Dan Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2015- 2018. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 3(2), 407–420.
- Yulinchton, M. R., Ariani, M. B. N., & Triwahyuningtyas, N. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Tegal Periode 2016-2019. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*,

